

SKRIPSI



ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAKASSAR MENGENAI FASAKH PERKAWINAN KARENA MURTAD

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar
Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks)

**OLEH :
ELLIDA WIRZA DESIANTY
B 111 06 271**

**BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
MAKASSAR MENGENAI FASAKH PERKAWINAN
KARENA MURTAD**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar
Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks)

OLEH

ELLIDA WIRZA DESIANTY

B 111 06 271

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum Acara
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAKASSAR MENGENAI FASAKH PERKAWINAN KARENA MURTAD

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar
Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks)

Disusun dan diajukan oleh

ELLIDA WIRZA DESIANTY

B 111 06 271

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 29 Agustus 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.
NIP. 19430310 197302 1 001

Sekretaris

Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

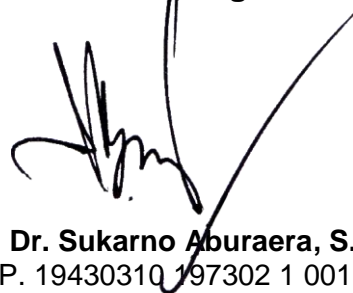
Nama : **ELLIDA WIRZA DESIANTY**
NIM : **B 111 06 271**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
MAKASSAR MENGENAI FASAKH PERKAWINAN
KARENA MURTAD
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar
Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, Juli 2013

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.
NIP. 19430310 197302 1 001

Pembimbing II



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002

PERSETUJUAN MENEMPUPH UJIAN SKRIPSI

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **ELLIDA WIRZA DESIANTY**
NIM : **B 111 06 271**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
MAKASSAR MENGENAI FSAKH PERKAWINAN
KARENA MURTAD
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar
Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks)**

Memenuhi syarat dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2013

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

ELLIDA WIRZA DESIANTY (B11106271), Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks) dibimbing oleh Bapak Sukarno Aburaera, sebagai Pembimbing I dan Bapak Achmad sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan ratio decidendi yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara cerai gugat seorang isteri murtad. Serta akibat hukum yang mengiringi putusan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Agama Makassar, hal ini berdasarkan putusan nomor 152/Pdt.G/2012/PA.Mks. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara langsung melalui tanya jawab yang telah dipersiapkan sebelumnya serta pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis bahas. Teknik pengolahan data yang dilakukan yaitu menganalisis semua data yang diperoleh untuk selanjutnya dideskripsikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam hal perkawinan yang dilaksanakan secara Islam namun di kemudian hari terjadi sengketa perkawinan (gugatan atau permohonan cerai), maka gugatan atau permohonan talak tersebut tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan agama walaupun salah satu pihak pasangan sudah tidak beragama Islam lagi (murtad). Karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat terjadinya sengketa. Hal ini diatur dalam UU nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 Pasal 2, dan Pasal 49 tentang perluasan kewenangan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Adapun ketentuan yang lebih mengikat tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk bertugas dan menyelesaikan perkara cerai murtad yaitu berdasarkan hasil Rakernas MARI tahun 2005 bagian C Bidang Badilag angka 3 huruf (a)

Pada putusan no.152/Pdt.G/2012/PA.Mks, status anak dari Fahrul Mustafa bin Baharuddin dan Ailiwati binti Benny Johan adalah anak sah dengan pembuktian Kutipan Akta Nikah Nomor 156/60/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 sehingga akibat hukum yang mengiringi anak-anak tersebut sama dengan anak sah. Sedangkan pembagian harta diatur dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974, Hal ini mengandung arti bahwa hanya harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan saja yang menjadi milik bersama yang harus dibagi menurut hukumnya masing-masing, sedangkan harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau wasiat tetap menjadi milik masing-masing pihak dan dikuasai penuh oleh masing-masing mereka.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada program studi strata satu/Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Serta salam kemuliaan bagi kekasih-Nya Rasulullah Muhammad SAW, pembimbing bagi siapa yang mencarinya, pemegang kunci gerbang menuju-Nya.

Adapun judul yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :
“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAKASSAR MENGENAI FASAKH PERKAWINAN KARENA MURTAD (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks)”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemukan hambatan dan tantangan baik bersifat internal maupun eksternal sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah. Hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan penulis sebagai manusia yang masih berada dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaannya.

Skripsi ini khusus penulis persembahkan kepada ayahanda tercinta **dr. H. Wirjadi Ali** dan Ibunda tercinta **Dra. Hj. Ermawaty Amiroenas,**

S.pd yang dengan penuh kasih sayang mendidik dan membesarkan penulis dengan segala pengorbanan yang tak ternilai harganya. Kepada saudara-saudariku kakandaku, **dr. Eva Yunita W, Elvy Meilisa W, Wandy Afrizal P** dan keponakanQ **Athalla Rizqi M**. Serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan serta bantuan moril selama ini. Untuk itu hanya do'a yang dapat penulis panjatkan semoga senantiasa mendapat berkah, rahmat dan tetap dalam lindungan-Nya. Amin.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H., M.H.**, selaku pembimbing I yang dengan ikhlas memberikan dorongan, bimbingan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. **Bapak Achmad, S.H., M.H.**, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini pula perkenankanlah kiranya penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.BO., FICS, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. H. Mustafa Bola, S.H., M.H., Rastiawaty, S.H., M.H., dan Fauziah P. Bakti, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah banyak memberi saran dan petunjuk kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Drs. H. Usman, S.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Makassar.
8. Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H., Dra. Hj. Nurjaya, M.H., Drs. Kamaruddin., Drs. H. Pandi, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Makassar.
9. Bapak dan ibu staf dan karyawan Pengadilan Agama Makassar
10. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Muh. Reza Karista, S.H., calon imamku untuk cinta, kasih sayang serta dukungan yang mengalir tanpa henti.
12. Keluarga besarku di Makassar dan di Palu atas doa dan dukungannya.
13. My BFF, A. Gisselawaty, S.H., Salma Alhameed, S.H., Selviyana, S.H., A. Khamisah Ayu, S.H., Nurfani D. Tallama,

S.H., Farrah C. Mangintek, S.H., Muh. Arfah, S.H., Imam Budiarto, S.H., Muh. Saifan Luthfi, S.H., Rey P. Siadari, S.H., untuk dukungan dan *support* kalian.

14. Saudara saudariku EKSAMINASI 2006 FH-UH, yang tidak bisa kusebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum dan penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas bantuan dan jasa-jasa semua pihak yang telah berupaya membantu penyusunan skripsi ini. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Makassar, Agustus 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	20
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Putusan Hakim.....	21
1. Pengertian dan Kewenangan Mengadili.....	22
2. Proses Pemeriksaan Perkara	24
3. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan	36
B. Fasakh Perkawinan Menurut Hukum Islam	39
1. Pengertian Fasakh.....	39
2. Dasar Hukum Fasakh	43
3. Sebab Difasakhnya Suatu Perkawinan	44
C. Batalnya Suatu Perkawinan	45
1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	46
2. Menurut Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam).....	48
BAB III. METODE PENELITIAN.....	52
A. Lokasi Penelitian.....	52
B. Jenis dan Sumber Data	52
C. Teknik Pengumpulan Data.....	53
D. Analisis Data.....	53
BAB IV. PEMBAHASAN	54
A. Dasar Hukum Pengajuan Gugatan Cerai Oleh Orang Yang Tidak Beragama Islam	54

B. <i>Legal Reasoning</i> putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam memutus perkara Nomor 152/Pdt.G/2012/PA.Mks.....	59
C. Akibat Hukum Putusan Hakim Pengadilan Makassar No. 152/Pdt.G/2012/PA. Mks.....	72

BAB V. PENUTUP 79

A. Kesimpulan	79
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah atau perkawinan adalah *aqad (ijab/qabul)* antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syara'.¹

Perkawinan disyari'atkan bukan hanya untuk memenuhi nafsu syahwat belaka, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih dari itu, yakni membentuk keluarga bahagian dan sejahtera. Sehingga akan melahirkan keturunan yang sah dan diridhoi oleh Allah SWT. Perkawinan disyari'atkan agar suami isteri bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam lindungan rumah tangga yang aman dan damai. Sebagaimana dianjurkan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفُونَ

wamin aayaatihi an khalaa lakum min anfusikum azwajaan litaskunuu
ilayhaa waja'ala baynakum mawaddatan warahmatan inna fii dzaalika
laaayaatin liqawmin yatafakkaruuna

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Q.S. Al-Rum:21)²

¹ Ustadz Dja'far Amir, *Fiqh Bagian Nikah, Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam*, Ab Sitti Syamsiyah, Solo, 1983, hlm. 7.

² Lembaga Lajnah Penerjemah Al-Qur'an, Semarang:Toha Putra, 1989, hlm. 644.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapat ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga. Dalam perkawinan tersebut Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami-isteri adalah hubungan yang suci dan mulia. Pengertian perkawinan yang lainnya, diantaranya menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³

Dari pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas, jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia, inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai

³ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983. Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami-isteri.

Meskipun perkawinan adalah ikatan lahir dan batin yang kuat antara suami dan istri, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan keadaan demikian ini menghendaki agar perkawinannya diputus melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari *kemadaramatan* dalam rumah tangga.

Dari semua agama yang diakui di Indonesia, dalam masalah perkawinan masing-masing mempunyai ketetapan bahwa perkawinan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang seagama. Dalam agama Islam ketetapan ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 44 yang berbunyi, "Seorang wanita Islam dilarang melaksanakan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam"⁴

Sebenarnya menjadi kewajiban tiap bagi suami dan istri untuk tetap memelihara hubungan baik antara keduanya. Selain melaksanakan kewajiban masing-masing dengan dasar saling mencintai, menyayangi,

⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 29.

menolong, lapang dada dan ikhlas. Dengan demikian mereka dapat mengenyam kebahagiaan hidup berumah tangga sebagaimana yang mereka dambakan. Mereka harus saling memaafkan atas kekhilafan yang lain. Keduanya harus ulet dalam menegakkan rumah tangganya agar jangan sampai goyah.

Tetapi kalau suasana menjadi ruwet dan timbul permasalahan, sekiranya masing-masing atau salah satunya tidak lagi mampu melaksanakan kewajibannya dalam hidup berumah tangga, maka untuk menyelamatkan diri dari kebinasaan dan kesengsaraan hidup karena ketidakberesan, tiada lain keduanya harus berpisah. Supaya percekocokkan tidak berjalan terus dan tidak ada yang menderita bathinnya, atau merasa tertekan dan sebagainya. Hal ini akan semakin diperparah jika salah satu diantara mereka ada yang menjadi *murtad*, secara otomatis, disadari atau tidak perjalanan biduk rumah tangga tersebut tidak lagi berjalan mulus. Karena masing-masing memiliki keyakinan yang berbeda yang tentunya tidak bisa disatukan visi dan misi dari masing-masing keyakinan tersebut, sehingga tidak bisa tercipta tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat pada pasal 3 Bab II KHI, yaitu : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah”.⁵ Jadi, di dalam kondisi seperti ini perceraian merupakan pintu darurat dari ikatan perkawinan karena tidak ada jalan lain untuk mengatasi keadaan.

⁵ *Ibid*, hlm. 14.

Islam memahami dan menyadari hal itu, karena itu Islam membuka kemungkinan perceraian dengan jalan *talak* maupun dengan jalan *fasakh* demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia.⁶ Perceraian dijadikan jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal mendayung bahtera rumah tangga, sehingga hubungan suami istri tidak larut dalam perselisihan.

Nabi Muhammad SAW bersabda :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (وداد واره)⁷

"Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ialah thalaq"

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami istri tidak dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*). Dan selain itu telah dilakukan berbagai upaya perdamaian baik melalui mediator maupun melalui *hakam (arbitrator)* dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist.⁸

Berdasarkan data yang penulis temukan di Pengadilan Agama Makassar, dari beberapa perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama Makassar ditemukan kasus cerai gugat yang diajukan istri murtad terhadap suami muslim, yaitu putusan No. 152/Pdt.G/2012/PA Mks serta putusan yang dijatuhkan oleh hakim dari Pengadilan Agama mengenai perkara perceraian tersebut.

⁶ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 29.

⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa, Drs. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hlm. 50.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 73

Adapun sebab dan cara berakhirnya perkawinan atas inisiatif suami dapat terjadi dengan jalan talak *ila'* dan *dhihar*. Sedangkan jika perceraian atas inisiatif dari pihak isteri dapat terjadi dengan *khulu'* dan *khiyar* (hak pilih antara meneruskan atau mengakhiri perkawinannya dengan jalan fasakh). *Fasakh* dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah, Baik yang terjadi karena suatu hal yang baru di alami sesudah akad nikah maupun setelah perkawinan berlangsung.⁹ Untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian, dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.¹⁰ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri lagi.¹¹

Istri yang hendak memutuskan hubungan perkawinan, pasal 14 sampai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.¹² Bila gugat cerai (*khulu'*) telah terlaksana, maka dampak atau akibat yang akan diterima istri yakni tidak bisa mendapatkan nafkah kembali dari mantan suaminya. Istri terhadap suami menjadi orang

⁹ Azhar Basyir, M.A. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Hukum UII, 1990, hlm.77.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 39 ayat (1)

¹¹ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)

¹² Muh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UUP Tahun 1974 dan KHI*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 131.

lain, sudah tidak menjadi tanggung jawab suaminya. Suami juga tidak berkewajiban menempatkan atau memberi nafkah kepada istrinya, meskipun hanya sementara saja.¹³

Dalam putusan No. 152/Pdt.G/2012/PA Mks selain menerima perkara yang diajukan oleh orang non muslim, yakni oleh penggugat yang bernama Ailiwati binti Benny Johan, Hakim-Hakim Pengadilan Agama Makassar ternyata juga memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara - perkara dalam gugatan tersebut, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Pasal 49 (1) UU No 3 Tahun 2006 pada BAB III mengenai Kekuasaan Pengadilan, yang lengkapnya berbunyi : "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara - perkara ditingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang : (a.) perkawinan, (b.) kewarisan, wasiat, dan hibah, (c.) waqaf, zakat dan shadaqah, (d.) ekonomi Syari'ah".¹⁴

Hal ini juga bertolak belakang dengan UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di BAB I tentang Ketentuan Umum, khususnya pasal 1 (1) dan pasal 2, yang berbunyi "Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang beragama Islam" dan "Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam

¹³ Musthafa Dhiibu Bhigha, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, alih bahasa ; Drs. H. Moh. Rifa'i, Kyai Baghawi Mas'udi, Cahaya Indah, Semarang, 1986, hlm. 267.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 79

mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini¹⁵

Ketidakjelasan kewenangan pengadilan tersebut merupakan suatu permasalahan hukum yang harus dicarikan kejelasannya. Di samping dalam rangka memperjelas kompetensi pengadilan dan peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara cerai gugat istri murtad serta pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara cerai gugat istri murtad juga berkaitan dengan akibat hukum yang timbul akibat putusan hakim terhadap anak dan harta bersama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah seperti di atas dapatlah dirumuskan tiga pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang tidak beragama Islam ?
2. Bagaimana *Reasoning* putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam memutus perkara Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks?
3. Apa akibat hukum putusan *fasakh* bagi perwalian anak dan harta bersama?

¹⁵ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Penyuluhan Hukum*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, Jakarta, 2006, hlm. 68

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang tidak beragama Islam.
2. Untuk mengetahui *Reasoning* putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam memutus perkara Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks.
3. Untuk mengetahui akibat hukum putusan *fasakh* bagi perwalian anak dan harta bersama.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain :

1. Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini memberikan kontribusi bagi keilmuan dalam bidang hukum, dan terutama dapat dijadikan model *prototype* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama yang lain
2. Dengan tersusunnya skripsi ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan adanya putusan serupa
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana program strata 1 (S1) dalam bidang Hukum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.¹⁶

Jenis-jenis perkara yang diperiksa Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama ada dua macam, yaitu :

a. Permohonan (*voluntaire*)

Permohonan adalah mengenai suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak lain yang saling bersengketa. Gugatan adalah suatu perkara yang terdapat sengketa antara dua belah pihak (soetantio, 1997: 10)

b. Gugatan (*contentieus*)

Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat dan pihak lain sebagai tergugat.

¹⁶ Mertokusumo, sudikno. *HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA*. Yogyakarta: Liberty. 1999

Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenar-benarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan telah selesai. Kemudian dijatuhkanlah putusan terhadap perkara atau sengketa tersebut.

1. Pengertian dan Kewenangan Mengadili

Kewenangan disebut juga kekuasaan atau kompetensi, kompetensi berasal dari bahasa latin *competo*, kewenangan yang diberikan undang-undang mengenai batas untuk melaksanakan sesuatu tugas. Kompetensi dalam bahasa Belanda disebut *competentie*, yakni kekuasaan (akan) mengadili. Kompetensi disebut juga kekuasaan atau kewenangan mengadili yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa di pengadilan atau pengadilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut.

Ada dua macam kompetensi atau kekuasaan/kewenangan mengadili, yaitu :

a. Kewenangan relative

Yang dimaksud dengan kekuasaan relative (*relative competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama... (Soetantio, 1997: 11)

b. Kewenangan absolute

Kewenangan absolute (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan

sengketa kekuasaan pengadilan (Soetantio. 1997: 11). Untuk merespon dinamika dan kebutuhan masyarakat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan perluasan kewenangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang¹⁷ :

- Perkawinan
- Waris
- Wasiat
- Hibah
- Wakaf
- Zakat
- Infaq
- Shadaqah, dan
- Ekonomi Syariah

Menurut penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah

¹⁷ www.badilag.go.id

lainnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Kewenangan Peradilan Agama yang semakin luas harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur pengadilan, sarana dan prasarana yang memadai, serta ketentuan hukum yang aplikatif. Dengan demikian paradigma baru peradilan agama benar-benar dapat menjawab tuntutan dan problema hukum yang berkembang di masyarakat.

2. Proses Pemeriksaan Perkara

Pengadilan Agama sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman harus menempatkan dirinya sebagai lembaga peradilan yang sesungguhnya (court of law) sesuai kedudukannya yang telah diberikan oleh undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bab IV Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 mengatur tentang Hukum Acara yang berlaku dalam Pengadilan Agama serta proses pemeriksaan perkara. Hal ini terlihat dalam pasal 54 dan pasal 55 yang berbunyi :

Pasal 54

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Permohonan perkara yang diajukan menurut ketentuan pasal 67 huruf (a), harus memuat, pertama, identitas pemohon yaitu setidaknya namanya, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu istri. Setelah penggugat memasukan gugatannya dalam daftar pada kepaniteraan Pengadilan dan melunasi biaya perkara, kemudian ia tinggal menunggu pemberitahuan hari sidang.

Berdasarkan wawancara dengan bagian Pelayanan dan Penerimaan Perkara Pengadilan Agama Makassar, proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Makassar dapat dijabarkan sebagai berikut:



1) Pencari Keadilan

Penggugat/Pemohon datang menghadap ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.

2) POSBAKUM

Penggugat/pemohon yang tidak mampu membayar jasa advokat berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Mereka ini diantaranya adalah perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- I. Petugas pemberi jasa hukum menyediakan blanko permohonan pelayanan Posbakum dan blanko surat pernyataan tidak mampu selama kurang lebih 2 menit.
- II. Pemohon bantuan hukum mengisi formulir permohonan bantuan hukum dilampiri SKTM atau kartu KKM, kartu JAMKESMAS, kartu PKH dan kartu BLT atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.
- III. Petugas pemberi jasa bantuan hukum melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, *advice*, konsultasi dan/atau pembuatan surat gugatan/permohonan
- IV. Petugas pemberi jasa hukum membuat surat gugatan/ permohonan dalam bentuk hardcopy dan softcopy selama

kurang lebih 45 menit (khusus bagi penggugat/pemohon yang berperkara secara prodeo)

3) Pemohon/penggugat/petugas pemberi jasa hukum kembali ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perkaranya

4) Pelayanan Penerimaan Perkara

- Pemohon/penggugat/petugas pemberi jasa hukum menghadap petugas Meja 1 dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan sebanyak 5 (lima) rangkap
- Petugas meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM. Hal ini didasarkan pasal 237-245 HIR
- Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan/ permohonan kepada penggugat.pemohon disertai dengan SKUM rangkap 3 (tiga)

- Pemohon/penggugat menyerahkan SKUM kepada pemegang kas (kasir)
- Pemegang kas menandatangani SKUM, membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugatan/permohonan
- Pemegang kas menyerahkan SKUM asli kepada pemohon/penggugat sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
- Pemohon/penggugat datang ke loket layanan bank Muamalat dan mengisi Slip sesuai dengan SKUM, seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pemohon/penggugat menyerahkan slip tersebut yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar sebagaimana tertera dalam Slip kepada teller bank.
- Setelah pemohon/penggugat menerima slip bank Muamalat yang telah divalidasi dari petugas layanan Bank Muamalat, pemohon/penggugat menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas
- Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali slip tersebut kepada pemohon/penggugat. Pemegang kas kemudian memberikan tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak

berperkara SKUM asli dan tindasan pertama serta surat gugatan/permohonan yang bersangkutan.

- Pemohon/penggugat menyerahkan kepada petugas Meja II, yakni surat gugatan/permohonan serta tindasan pertama SKUM.
- Petugas Meja II mendaftarkan surat gugatan/permohonan dalam register bersangkutan serta member nomor register pada surat gugatan/permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
- Petugas Meja II menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak yang berperkara.

5) Persiapan Persidangan Pengadilan Agama

- Penetapan Majelis Hakim
 - I. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah proses registrasi perkara diselesaikan, Petugas Meja II menyampaikan berkas gugatan/permohonan kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.
 - II. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja ketua pengadilan menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

- Penunjukkan Panitera Sidang

Panitera pengadilan dapat menunjuk dirinya sendiri atau Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menangani perkara.

- Penetapan Hari Sidang

- I. Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya segera diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk.
- II. Ketua Majelis Hakim setelah mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang.
- III. Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis Hakim harus memperhatikan jauh/dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan.
- IV. Pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan/permohonan didaftarkan di Pengadilan Agama. (Pasal 68 (1) dan 80 (1) UU No. 7/1989).

6) Pemanggilan Pihak-Pihak

- Pemanggilan para pihak untuk menghadap sidang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak atau kuasanya di tempat tinggalnya.
- Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan pada Lurah/Kepala Desa untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.

- Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang paling sedikit 3 (hari) kerja
- Apabila tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilan dilaksanakan dengan melihat jenis perkaranya, yaitu :

a) Perkara di bidang Perkawinan

Dipanggil dengan pengumuman di media masa sebanyak 2 (dua) kali tayangan dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua. Dan tenggang waktu antara pengumuman terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan (Pasal 27 PP.9/1975 jo. Pasal 139 KHI)

b) Perkara yang berkenaan dengan harta

Dipanggil melalui Bupati/Walikota dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama setempat dengan menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman Bupati/Walikota dan papan pengumuman Pengadilan Agama (Pasal 390 (3) HIR/Pasal 718 (3) RBg).

c) Pemanggilan terhadap tergugat/termohon yang berada di Luar Negeri dikirim melalui Departemen Luar Negeri, Dirjen dan Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan

tembusan disampaikan kepada KBRI di Negara yang bersangkutan.

7) Persidangan (Tahap Pra Mediasi)

- Pada hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi
- Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 (empat puluh) hari kerja
- Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa
- Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada sidang pertama atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya
- Apabila dalam jangka waktu tersebut (poin 4) para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

8) Proses Mediasi

- Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan *resume* perkara kepada Hakim mediator yang ditunjuk

- Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim
- Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
- Apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan “Kaukus”
- Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah GAGAL jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 (dua) kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

9) Persidangan

- Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim
- Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

10) Upaya Perdamaian (Bagi Perkara Cerai Talak)

Tahapan Persidangan :

- Penyitaan.
- Upaya Perdamaian dan Mediasi (Pasal 82 UU No. 9/1975 dan PERMA No. 1/2008)

- Pembacaan Surat Gugatan/Permohonan.
- Jawaban, Reflik, Duflik
- Pembuktian.
- Khusus perkara perceraian dengan alasan perselisihan perlu didengar keterangan/saksi dari keluarga dan orang dekat dari kedua belah pihak (Pasal 22 PP. 9/1975 jo. Pasal UU No. 7/1989).
- Kesimpulan.
- Putusan

11)Pemanggilan Para Pihak Bagi Perkara Cerai Talak dan Pemberitahuan Isi Putusan Bagi Pihak Yang Tidak Hadir

12)Sidang Ikrar Talak

- Perkara Cerai Talak
 - a) Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Ketua Majelis menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak.
 - b) Pemohon dan termohon dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Dan termohon mengucapkan ikrar talak.
 - c) Jika termohon telah dipanggil secara sah tidak datang atau tidak mengirimwakinya untuk datang, pemohon dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya termohon.
 - d) Jika pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah

dipanggil secara sah, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut (Pasal 70 UU No. 7/1989).

- Perkara Yang Berkenaan Dengan Harta
 - a) Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap, dan para pihak tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut dengan suka rela, maka pihak yang dimenangkan putusan tersebut mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama.
 - b) Eksekusi dilaksanakan oleh Jurusita

13) Kasir (Pengembalian Sisa Panjar)

14) Prosedur Tentang Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan dan/atau Akta Cerai Kepada Pihak Berperkara

- a) Panitera Muda Hukum menerima berkas Bundel A dari Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti serta memeriksa kelengkapan berkas tersebut
- b) Wakil Panitera menyerahkan berkas (Bundel A), salinan putusan/penetapan dan/atau akta cerai yang akan ditandatangani panitera ke wakil panitera
- c) Panitera menyerahkan berkas (Bundel A), salinan putusan/penetapan dan/atau akta cerai yang akan ditandatangani panitera ke panitera
- d) Para pihak datang ke petugas Meja III dengan membawa identitas diri, mengambil nomor antrian layanan pengambilan salinan putusan/penetapan dan/atau akta cerai.

3. Ratio Decidendi Putusan

a. Definisi Ratio Decidendi

Ratio decidendi adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk keputusan itu”, “the reason”, atau “the rationale for the decision”. Kusumadi Pudjosewojo dalam Pedoman Pelajaran Tata Hukum (1976) mendefinisikan sebagai faktor-faktor yang sejati (material fact) faktor-faktor yang esensiil yang mengakibatkan keputusan begitu itu. *Ratio decidendi* tidak hanya penting dalam sistem precedent, yakni hakim terikat untuk menerapkan putusan pengadilan terdahulu baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus yang serupa. Akan tetapi juga berperan penting di Negara bertradisi *civil law system*.¹⁸

Legal reasoning atau *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara.¹⁹ Dalam menggunakan pendekatan kasus, apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum maka yang mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum putusan “*Ratio decidendi*”²⁰

Untuk menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan biasanya dapat dilihat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah

¹⁸ Diakses di <http://miftakhulhuda.com>

¹⁹ Diakses di <http://hukumpedia.com>

²⁰ Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009

satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *ratio decidendi*. Di dalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”. *Ratio* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu. Dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan. Yang menentukan adalah *Ratio decidendi* putusan itu.²¹

Parameter independensi Hakim dalam memeriksa suatu perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan Hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Hal senada juga dijelaskan oleh Bambang Sutiyo dan Sri Puspitasari Hastuti (2005: 54) :²²

“kalau para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya, kalau hakim tidak terpengaruh dan dapat tetap bersikap obyektif meskipun banyak mendapatkan tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka Hakim tersebut adalah Hakim yang memegang teguh kemandiriannya.”

Ratio decidendi secara hukum mengikat pengadilan yang lebih rendah melalui doktrin “*stare decisis*” yang di Indonesia dikenal dengan doktrin *precedent*. Akan tetapi, perlu juga dikemukakan bahwa dalam

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2009, Hal. 94

²² Bambang Sutiyo dan Hastuti, Sri Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2005. Hal.54

menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum melainkan juga pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak relevansi dengan fakta yang dihadapi (*obiter dicta*). Karena bisa saja terjadi dalam perkembangan yang semula *obiter dicta* dalam perkara lain, namun di kemudian hari menjadi *ratio decidendi*.

b. Fungsi Ratio Decidendi

Pada umumnya, fungsi *ratio decidendi* atau *Legal Reasoning* adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan seorang lainnya, atau antara masyarakat dengan pemerintah terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replica dan duplica percontohan terutama menyangkut baik dan buruknya system penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparaturnya hukum dan lembaga peradilan.²³

Putusan pengadilan atau yurisprudensi sebagai sumber hukum sangat penting artinya bagi praktik hukum. Pendekatan perundang-undangan tidak selalu memberikan pedoman dalam membangun argumentasi hukum. Dalam situasi tersebut maka untuk memperoleh kepastian tentang kaidah yang relevan dapat ditempuh dengan pendekatan kasus, yakni membangun argumentasi hukum dengan mengacu pada pendapat hukum yang dirumuskan hakim dalam sebuah putusan pengadilan.

²³ Abraham Amos HF. *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2007. Hal 34

B. Fasakh Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Fasakh Nikah

Fasakh artinya putus atau batal. Menurut bahasa kata “fasakh” berasal dari bahasa arab فسخ - فسخا - يفسخ - فسحا yang berarti batal atau rusak.²⁴

Sedang secara istilah *fasakh* ialah :

فسخ العقد وقضه , وحل المابة التي تربط بين الزوجين²⁵

“faskhul aqdi adalah membatalkan aqad, dan melepaskan tali ikatan perkawinan suami istri.”

Fasakh ialah merusak nikah atau membatalkan perkawinan antara suami istri yang dilaksanakan oleh hakim, karena sebab-sebab yang dianggap sah untuk melaksanakan dan menetapkan adanya fasakh itu berdasarkan tuntutan dan keberatan keberatan yang diajukan pihak istri atau suami.²⁶

Sedangkan Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan *fasakh* disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.²⁷

Menurut Hasbullah Bakry SH. *Fasakh* adalah perceraian yang diselenggarakan oleh hakim berdasarkan atas sebab-sebab yang telah

²⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia – Arab*, Jakarta: Pustaka Progresif, 1996, cet. Ke-I, hlm. 92

²⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Tentang NTCR II*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1985, hlm. 23.

²⁶ Dja'far Amir, *loc. cit.*

²⁷ Musthafa Dhiibu Bhigha, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, alih bahasa ; Drs. H. Moh. Rifa'i, Kyai Baghawi Mas'udi, Cahaya Indah, Semarang, 1986, hlm. 152

ditetapkan oleh syari'ah salah satu suami/isteri sakit gila, sopak (belang), sakit kusta (lepro). Suami innin (tidak kuasa bersetubuh) suami miskin, tidak kuasa memberi makan, pakaian atau tempat kediaman kepada isterinya (seperti telah ditetapkan pada syari'ah) fasakh dapat juga diminta apabila pernikahan sudah dijanjikan bahwa mempelai laki-laki atau mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu, umpamanya tentang keturunan atau pekerjaan kemudian ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan itu.²⁸

Menurut Ensiklopedi Islam *Fasakh* ialah pemutusan hubungan pernikahan oleh hakim atas permintaan suami atau isteri atau keduanya akibat timbulnya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami-isteri secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan.²⁹ Perceraian dapat terjadi oleh berbagai faktor dalam suatu perkawinan. Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.

Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat bercerai tadi dengan jalan membuka

²⁸ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.t-th.hlm. 242.

²⁹ Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Arda Utama, 1992/1993, hlm. 282.

lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal. Secara umum alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan istri yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu

Beberapa bentuk cara memutuskan hubungan perkawinan menurut Hukum Islam antara lain³⁰ :

a. Ta'lik Talak (Al-Qur'an An-Nissa: 128)

Artinya talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian

b. Khuluk/mubaraah (Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh : 229),

Khuluk artinya suatu ikatan perkawinan dapat putus oleh karena adanya kehendak dari istri oleh karena suatu sebab, sedangkan suaminya memberikan kepada istrinya suatu khuluk, yang artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada istrinya dalam bentuk talak. Sedangkan Muibara'ah, artinya baik istri maupun suami sama-sama membebaskan dirinya dari kekuasaan sebagai suami maupun istri dengan memenuhi persyaratan antara lain :

³⁰ Muhammad Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam** , Bumi Angkasa, Jakarta, hal.2

1. Harus ada persetujuan bebas dari suami dan istri.
 2. Pemberian iwadh oleh istri kepada suami sebagai penebus/pengembalian mahar yang dulu pernah diterima
- c. Fahisah (Al-Qur'an Surat An-Nissa: 15)
- Suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji/perbuatan buruk yang memalukan keluarga seperti perbuatan mesum, lesbian, dan lain-lain.
- d. Fasakh
- Fasakh ialah pembatalan akad dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dengan istri. Fasakh dapat terjadi karena cacat dalam akad atau karena sebab lain yang datang kemudian dan mencegah kelanjutan perkawinan
- e. Illa (Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh: 226)
- Adalah merupakan sumpah yang digantungkan, hal ini dilakukan oleh suami yang bersumpah tidak akan memcampuri istrinya dan dia tidak akan menalak atau menceraikan istrinya, sehingga membuat istrinya menderita
- f. Zhihar (Al-Qur'an Surat A-Mujaadillah: 1,2,3 dan 4)
- Zhihar adalah seseorang bersumpah, bahwa istrinya sama dengan punggung ibunya, hal ini berarti ungkapan khusus bagi orang ditanah arab yang berarti ia tidak akan mencampuri istrinya lagi karena istrinya sudah diibarkan sama dengan ibunya.

g. Li'an (Al-Qur'an Surat An-Nur: 6 dan 7)

Li'an adalah merupakan sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Allah, hal ini bisaanya terjadi ketika suami menuduh istrinya berbuat zina, padahal dia sendiri tidak mempunyai saksi.

h. Murtad (Riddah)

Suatu perbuatan dimana salah satu seseorang dari suami atau istri keluar dari agama islam. Murtad berasal dari bahasa arab yaitu riddah yang mempunyai arti "kembali ke jalan asal".

2. Dasar Hukum Fasakh

Mengenai dasar difasakhnya suatu perkawinan ini, ada dalam Kitab Al-Muhadzdzab Juz II halaman 54 :

إذا ارتد لزوج أو أحد هافاق بل لدخول وقت عت ال فر³¹

قة او ان كان بعد اول دخول قعت ال فرقة على ان قضاء ال عدة

"Apabila suami istri atau salah seorang diantaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dukhul maka, perceraian jatuh setelah habis masa iddah."

Namun kalau dasar tersebut diterapkan pada kondisi masyarakat Indonesia saat ini tidak akan bisa berjalan, karena dalam peraturan hukum di Indonesia, selain suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama, juga harus sah menurut hukum negara. Jadi, jika terjadi perceraian (thalaq maupun *khulu'*) dalam suatu perkawinan, harus melewati sidang

³¹ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 56.

perceraian di Pengadilan, agar perceraian tersebut sah di mata negara. Begitu juga jika salah seorang suami atau istri murtad, meskipun menurut agama Islam perkawinan tersebut *fasakh* atau batal dengan sendirinya, namun menurut hukum Indonesia, harus juga melewati proses persidangan di Pengadilan.

3. Sebab-sebab Difasakhnya Suatu Perkawinan

Adakalanya *fasakh* disebabkan karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika akad nikah dan adakalanya disebabkan oleh hal-hal lain yang datang kemudian yang menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan³²

- a. *Fasakh* yang disebabkan tidak terpenuhi syarat-syarat ketika akad nikah
 - 1) Setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
 - 2) Pernikahan yang dilakukan ketika belum baligh (kecil), kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*, jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri maka hal ini disebut *fasakh baligh*.
- b. *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad
 - 1) Jika seorang suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.

³² Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munahakat* (Jakarta:Kencana.2003) hal. 141-142

- 2) Jika suami yang tadinya kafir masuk islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain halnya kalau istrinya ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.

Hak untuk memutuskan perkawinan dengan jalan fasakh diberikan kepada suami atau isteri, melalui kekuasaan pengadilan agama, suami atau isteri sebagai penggugat harus mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama dengan bukti-bukti bahwa perkawinan mereka tidak dapat diteruskan, karena ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya fasakh. Hak melepaskan diri dari ikatan perkawinan tidak mutlak di tangan kaum lelaki, memang hak talak ini diberikan kepadanya tetapi di samping itu kaum wanita diberi juga hak menuntut cerai dalam keadaan-keadaan dimana ternyata pihak lelaki berbuat menyalahi dalam menunaikan kewajibannya atau dalam keadaan-keadaan yang khusus. Salah satu hak istri untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan ialah dengan jalan fasakh.

C. Batalnya Perkawinan

Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.

Menurut Muhammad Yahya Harahap, secara teoritis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut

prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum sampai ada ikut campur tangan pengadilan³³. Hal ini berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa *“batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan”*³⁴

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan diadakan bukan untuk waktu sementara dan bukan ikatan lahir saja melainkan ikatan lahir dan batin serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia untuk selama-lamanya (kekal). Oleh karena itu, perceraian dan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan atau sebab-sebab yang memaksa dan yang menyimpang dari hukum apabila diteruskan. Batalnya perkawinan atau putusanya perkawinan dapat juga dikenal dengan istilah *fasakh*. Namun dalam UU Perkawinan tidak disebutkan tentang *fasakh* melainkan pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan

³³ Yahya Harahap. Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Mesan: CV. Zahir Trading Co. 1975) Cet 1 hal. 4

³⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: BW Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007) Cet ke-38 hal. 572

sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada. Dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :³⁵

- a. Perkawinan dianggap tidak sah
- b. Juga dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada
- c. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya itu dianggap tidak pernah sebagai suami isteri.

Menurut UUP, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974, yang kesemuanya sepanjang hukum masing-masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁶

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila³⁷ :

- a. *Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974.*
- b. *Salah satu dari kedua belah pihak masih terikat dengan perkawinan bersama orang lain, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 24 UU Nomor 1 Tahun 1974*
- c. *Perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 26 UU Nomor 1 Tahun 1974.*
- d. *Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974.*
- e. *Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974. Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.*

³⁵ Yahya Harahap. Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Mesan:CV.Zahir Trading Co.1975) Cet 1 hal.7

³⁶ Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional(Jakarta:Rineka cipta, 1991) hal.106

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pembatalan perkawinan tentunya mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan setelahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat (2) dinyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. *Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga anak tetap menjadi anak sah dan berhak mewaris tanpa memandang adanya itikad baik dari kedua suami istri saat melangsungkan perkawinan.*
- b. *Suami atau isteri yang bertindak dengan beritikad baik kecuali terhadap harta bersama, apabila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan terdahulu*
- c. *Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembatalan perkawinan adalah pasal 86-92 KUH Perdata, pasal 22-28 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 37-38 PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 70-76 dalam kompilasi hukum Islam.

2. Menurut Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam)

Kehadiran KHI di Indonesia sangat menggembirakan umat Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan KHI merupakan buku kompilasi pertama yang berbahasa Indonesia tentang hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketentuan tentang pembatalan nikah dibahas dalam KHI pada BAB XI yang memuat enam pasal yakni dari pasal 70-pasal 76.

Selain sebagai buku kompilasi hukum, KHI jauh lebih berfungsi sebagai pegangan yurisprudensi hakim dalam menyelesaikan sengketa keluarga di pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama.³⁸ Hal ini

³⁸ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta:Logos wacana Ilmu, 1999) hal. 113-114

dimaksudkan agar para hakim memakai kitab hukum yang sama dalam proses pengambilan keputusan hukum serta masyarakat pun mendapat kepastian hukum

Sebab-sebab pembatalan nikah diatur dalam KHI pasal 70 menerangkan hal-hal yang menyebabkan perkawinan batal, yaitu :

- a. *Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;*
- b. *Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;*
- c. *Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;*
- d. *Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :*
 - 1) *Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.*
 - 2) *Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.*
 - 3) *Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.*
 - 4) *Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.*
- e. *Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya*

KHI juga menyebutkan sebab-sebab pembatalan perkawinan melalui jalan dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan disini maksudnya adalah batalnya suatu pernikahan diputuskan oleh pengadilan. Perkawinan yang dapat dibatalkan disebabkan karena tidak atau kurang terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. KHI mengaturnya dalam pasal 71 yang berbunyi :

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;*
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.*
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;*
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;*
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;*
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan*

Sebab-sebab pembatalan perkawinan yang juga diatur dalam KHI

adalah mengenai hal-hal yang dapat diajukan sebagai permohonan pembatalan nikah. Ketentuan ini diatur dalam pasal 72 yang berbunyi :

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.*
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.*
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.*

Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan

perkawinan diatur dalam pasal 73 KHI, yaitu :

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;*
- b. Suami atau isteri;*
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.*
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.*

Disamping membahas mengenai sebab-sebab pembatalan nikah, BAB XI juga membahas kewenangan Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu pembatalan pernikahan yang dimuat dalam pasal 74 KHI. Kewenangan yang dimaksud adalah kompetensi relative Pengadilan Agama. Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat pernikahan dilangsungkan.

Suatu pembatalan pernikahan menimbulkan akibat hukum. Pasal 75 KHI menjelaskan tentang asas tidak berlaku surut terhadap beberapa hal, yaitu :

- Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :*
- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;*
 - b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;*
 - c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.*

Hal terakhir yang harus diatur dalam bab pembatalan perkawinan dalam KHI adalah mengenai status hukum anak. Hal tersebut diatur sangat jelas dalam pasal 76 KHI, sebagaimana disebutkan sebagai berikut :

“Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, tepatnya di Pengadilan Agama Makassar. Hal yang mendasari pemilihan Pengadilan Agama Makassar sebagai lokasi penelitian ialah karena di Pengadilan Agama Makassar banyak menerima, memeriksa serta memutus perkara cerai gugat isteri murtad seperti pada putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA.Mks.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data, melalui wawancara atau tanya jawab dengan narasumber. Narasumbernya yaitu Majelis Hakim yang terlibat langsung dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data yang sudah tersaji di Pengadilan Agama Makassar, dalam hal ini adalah berkas putusan perkara Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks. yaitu perkara murtad sebagai alasan fasakh nikah, dokumen pribadi Pengadilan Agama Makassar serta kompilasi hukum Islam tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah, hukum acara perdata, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab terhadap narasumber yang dianggap berkaitan dengan kegiatan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu

D. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pengajuan Gugatan Cerai Oleh Orang Yang Tidak Beragama Islam

Pertanyaan yang sering muncul ketika membicarakan masalah tentang pembatalan suatu perkawinan dikarenakan salah seorang pihak, baik suami ataupun istri beralih agama dari Islam (murtad) ke agama lain adalah lembaga peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah perceraian, yaitu, Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama non-muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud pengadilan, yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 1 (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan Pengadilan Negeri bagi gugatan-gugatan perceraian yang diajukan oleh mereka yang tidak memeluk agama Islam.

Secara umum fungsi kewenangan mengadili di lingkungan Pengadilan Agama telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan diadakan perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang kekuasaan Kehakiman bahwa

Pengadilan Agama merupakan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara yang dimaksud dan disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk merespon dinamika dan kebutuhan masyarakat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan perluasan kewenangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 49, yakni Pengadilan Agama tidak hanya bertugas dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, shadaqoh dan wakaf saja akan tetapi wewenang Pengadilan Agama ditambah menjadi menangani perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Zakat, Infak, Ekonomi Islam bahkan Pengangkatan Anak.

Perubahan signifikan lainnya dari UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah mengenai subjek hukum yang diperluas menjadi tidak hanya orang Islam dalam pengertian teologis, akan tetapi termasuk orang atau badan hukum yang menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam.

Alasan perceraian antara suami isteri dilatarbelakangi oleh faktor-faktor dan alasan-alasan tertentu. Alasan perceraian atas dasar pindah agama diakui dan diterima oleh pengadilan agama sebagai salah satu alasan penyebab perceraian. Dari hasil wawancara dengan ibu Dra Hj. Nurjaya, M.H., beliau menyatakan dari beberapa kasus cerai gugat dan cerai talak yang diputus oleh Pengadilan Agama Makassar, alasan

murtadnya salah satu pasangan dirasa sudah cukup menjadi alasan atau dasar pertimbangan hakim untuk menerima perkara tersebut. Hal ini disebabkan murtadnya istri ataupun suami diduga akan menimbulkan *kemudharatan* (dharar) dan/atau tindakan yang *memudharatkan* pihak lain atau tindakan saling *memudharatkan* (dhirar) dalam hal syiqaq yang nantinya menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga³⁹. Perumusan alasan perceraian tersebut tercantum dalam kompilasi hukum Islam Pasal 116 huruf (h) dan ini sering dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama sebagai dasar pertimbangan hakim, selain itu tidak lepas tentunya dari ketentuan pokok mengenai alasan-alasan perceraian yaitu ketentuan yang ada dalam Pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975.

Agama Islam memberi kemudahan bagi calon pemeluknya untuk masuk dan memeluk agama Islam. Hanya dengan mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat '*Asyhadu allaa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah*', baik itu diucapkan dalam hati maupun di depan ustadz ataupun lembaga yang berwenang untuk mengislamkan. Kemudahan inilah yang seringkali disalahgunakan oleh pasangan beda agama yang ingin *melegalkan* pernikahan mereka di Indonesia. Dalam upaya memuluskan proses perkawinan dalam tataran praktek biasanya salah satu pasangan pindah agama atau menjadi *muallaf* mengikuti agama calon pasangannya, yakni agama Islam dan selanjutnya

³⁹ Wawancara tanggal 3 Juli 2013 dengan ibu Dra Hj. Nurjaya, M.H.

melangsungkan perkawinan secara Islam. Namun, setelah mengarungi bahtera pernikahan selama beberapa bulan atau tahun pihak *mualaf* tadi kembali ke agamanya semula. Keluarnya salah satu pasangan dari Islam akan menimbulkan goncangan yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam upaya mengantisipasi permasalahan tersebut, Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah melakukan terobosan hukum dengan menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah "*Murtad* yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga". Ketentuan tersebut merupakan langkah maju kalau dibandingkan dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri*
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. menyatakan apabila terjadi sengketa antara suami istri dan

kedua belah pihak bermaksud mengakhiri perkawinan mereka karena pindah agama (*murtad*) dapat diselesaikan dengan dasar hukum yang berlaku pada saat pernikahan dilakukan. Sehingga apabila seseorang melangsungkan perkawinan secara Islam dan dikemudian hari terjadi sengketa perkawinan maka perkaranya tetap menjadi kewenangan absolute peradilan agama walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi (*murtad*), baik dari pihak suami atau isteri tidak dapat menggugurkan asas personalitas kelslaman yang melekat pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan. Hal ini berarti setiap penyelesaian sengketa perceraian murtad ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat terjadinya sengketa⁴⁰.

Bapak Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. menambahkan bahwa penerapan asas personalitas kelslaman dalam Pengadilan Agama didasarkan pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 49 ayat (1) jo penjelasan umum angka 2 alinea 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang intinya bahwa yang berhak berperkara di Pengadilan Agama adalah mereka yang beragama Islam dalam perkara perdata tertentu. Selain itu juga didasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 726 K/Sip/ 1976 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian) ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan bukan agama yang dianut para

⁴⁰ Wawancara tanggal 3 Juli 2013 dengan Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

pihak pada saat sengketa terjadi. Sehingga penerapan asas personalitas kelslaman didasarkan pada hubungan hukum yang melandasi terjadinya sengketa⁴¹

Adapun ketentuan yang lebih mengikat tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk bertugas dan menyelesaikan perkara cerai murtad yaitu berdasarkan hasil Rakernas MARI tahun 2005 bagian C Bidang Badilag angka 3 huruf (a) yang menyatakan bahwa "*Pengadilan Agama berwenang mengadili seseorang (pihak) yang sudah Murtad, karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi*".⁴²

B. *Legal Reasoning* Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar No. 152/Pdt.G/2012/PA. Mks

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa *Legal reasoning* atau *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara.⁴³ Untuk menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan biasanya dapat dilihat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *ratio decidendinya*. Di dalam hukum Indonesia

⁴¹ Wawancara tanggal 3 Juli 2013 dengan bapak Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

⁴² Dokumen PA Makassar, Mahkamah Agung, *Jawaban Alas Pertanyaan yang Diajukan PTA se-Indonesia Dalam Rakernas MARI Tahun 2005*, Denpasar 18 std 22 September 2005. Hal. 134

⁴³ Diakses di : <http://hukumpedia.com>

yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”.

Adapun pertimbangan atau *Legal Reasoning* yang dipakai oleh majelis hakim dalam memutus perkara terhadap gugatan perceraian akibat isteri murtad dengan putusan no.152/Pdt.G/2012/PA.Mks adalah bahwa majelis hakim, dalam perkara ini majelis hakim menunjuk bapak Drs. Mahmuddin, S.H., M.H. sebagai mediator hakim telah berupaya menasehati penggugat agar berdamai dengan tergugat dan segala permasalahan keluarga hendaknya diselesaikan dengan jalan damai. Hal ini sesuai dengan maksud dari PERMA No. 1 Tahun 2008⁴⁴, namun maksud baik tersebut tidak berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H tanggal bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa meskipun penggugat beragama Kristen (murtad) namun karena perkawinannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam, maka berdasarkan Azas Personalitas Keislaman sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 dan 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, permohonan pemohon tetap menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

⁴⁴ PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi yang mewajibkan hakim, mediator dan para pihak yang berperkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi

2. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena penggugat telah kembali kepada agamanya semula, yaitu dari agama Islam ke agama Keristen Pantekosta sehingga hubungan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi.

Berdasarkan surat gugatan penggugat, keterangan penggugat di persidangan, jawaban tergugat serta keterangan saksi dari penggugat, yakni Erni Lewa binti Eiyang Wingkiong di persidangan maka lebih jelasnya majelis hakim menjabarkan pertimbangan atau *Legal Reasoningnya* yang tertuang dalam “**TENTANG HUKUMNYA**”, yaitu :

- a. Menimbang, bahwa pengadilan agama menerima perihal berdasarkan apa yang sudah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut diatas ;
- b. Menimbang, bahwa karena penggugat telah mengucapkan sumpah yang telah dibebankan kepadanya itu, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah didukung dengan alat bukti yang cukup ;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena penggugat telah kembali kepada agamanya semula, yaitu dari agama Islam ke agama Keristen

Pantekosta sehingga hubungan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, ikatan batin mereka sudah dipisahkan dengan perbedaan keyakinan, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir bathin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

- d. Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan ;

- e. Menimbang, bahwa karena penggugat sudah beralih kembali ke agamanya semula, yaitu dari agama Islam ke agama Keristen Pantekosta, hal mana penggugat tersebut tidak lagi beragama Islam mengakibatkan hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat menjadi rusak (pasakh) sehingga oleh karenanya majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak ba`in tergugat terhadap penggugat ;
- f. Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Makassar, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Dalam Rekonvensi

- a. Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi/tergugat konvensi menuntut agar kedua anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang bernama Anak 1, dan Anak 2 diasuh oleh penggugat rekonvensi karena penggugat rekonvensi menghawatirkan keyakinan kedua anak tersebut mengikuti

keyakinan tergugat rekonvensi manakala diasuh oleh tergugat rekonvensi ;

- b. Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi tersebut tergugat rekonvensi tidak keberatan asalkan penggugat siap merawat dan membiayai kedua anak tersebut ;
- c. Menimbang, bahwa karena tergugat rekonvensi tidak keberatan atas gugatan penggugat rekonvensi, dan keduanya sepakat menyerahkan pemeliharaan kedua anak tersebut kepada penggugat rekonvensi, maka majelis hakim perlu menetapkan bahwa kedua anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi bernama Anak 1 dan Anak 2, berada dalam asuhan pengggat rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi ;
- b. Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Analisis Penulis

Dalam kasus ini penggugat beragama Kristen (murtad) dan tergugat beragama Islam. Perkawinan keduanya telah dilangsungkan di KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan Bukti Surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/66/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan majelis hakim yang menangani kasus cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Makassar, dapat dijelaskan bahwa dahulu sistem yang berlaku di Pengadilan Agama terkait dengan penanganan kasus permohonan atau gugatan perceraian masih menekankan prinsip bahwa orang yang berbuat salah tidak boleh mengajukan gugatan. Oleh karena itu permohonan atau gugatan yang diajukan oleh pihak suami atau istri dimana penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga itu suami atau itu istri sendiri, oleh pengadilan gugatan atau permohonan itu ditolak.

Dalam praktik terdahulu, seorang istri memasukkam gugatan perceraian kepada pengadilan padahal penyebab diajukannya gugatan perceraian ini adalah karena kemurtadan yang dilakukan oleh penggugat itu sendiri. Maka dengan menerapkan prinsip tersebut, gugatan cerai ini akan ditolak oleh Pengadilan. Namun, prinsip tersebut saat ini telah dibatalkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang baru yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 tahun 1990 MA 38/K/AB/1990

tanggal 5 Desember 1991⁴⁵. Yurisprudensi inilah yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena istri murtad.

Yurisprudensi Mahkamah Agung ini sekilas terkesan mengabaikan prinsip yang dianut dalam undang-undang perkawinan yaitu prinsip mempersulit perceraian. Hal ini dikarenakan prinsip yang dipakai dalam Yurisprudensi ini sudah tidak lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, serta apa penyebab terjadinya perceraian tersebut. Dengan Yurisprudensi ini, hakim diwajibkan untuk melihat fakta yang sebenarnya. Sejauh manakah perselisihan itu terjadi sehingga kedua belah pihak tidak mungkin untuk dipersatukan kembali dalam ikatan perkawinan. Sehingga walaupun dalam kasus ini ternyata Penggugat sendirilah yang berperan sebagai penyebab retaknya rumah tangga, maka gugatan cerai tetap dapat dikabulkan oleh hakim.

Sedangkan prinsip mempersulit perceraian tetap dijalankan dalam menangani kasus gugatan perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam proses jalannya persidangan, bahwa sebelum melaksanakan persidangan hakim wajib mendamaikan para pihak. Terlebih saat ini telah berlaku PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi yang mewajibkan hakim, mediator dan para pihak yang berperkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dengan adanya Yurisprudensi ini, setiap pasangan yang mengajukan permohonan atau gugatan cerai akan

⁴⁵Data arsip PA Makassar, Yurisprudensi MA No. 38 tahun 1990 MA 38/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991 yang berisi tentang prinsip hakim dalam memutuskan perceraian tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, serta apa penyebabnya

dijatuhkan putusan perceraianya asalkan pasangan tersebut bisa menunjukkan kepada Pengadilan bahwa kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak dapat disatukan kembali.

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Makassar untuk menerima kasus cerai gugat istri murtad dengan no. 152/Pdt. G/2012/PA.Mks sudah tepat, karena berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 dikatakan bahwa *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Pasal ini mengandung asas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum agamanya atau kepercayaannya, hal ini menunjukkan adanya penundukkan terhadap suatu hukum. Apabila terjadi perkawinan antara laki-laki dan seorang wanita maka yang harus diperhatikan adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi.

Apabila perkawinan ini dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di KUA, maka segala permasalahan yang terjadi setelah perkawinan diselesaikan sesuai ketentuan hukum Islam dan hal ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Azas Personalitas Keislaman sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 dan 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, yang berbunyi : *“Asas personal keislaman adalah asas yang menyatakan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukan pada lingkungan*

Peradilan Agama adalah mereka yang beragama Islam, rakyat yang tidak beragama Islam atau non-Islam tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada Peradilan Agama”.

Hal ini disebabkan Pengadilan Agama adalah suatu Pengadilan yang diperuntukkan bagi umat Islam dalam memecahkan suatu persoalan atau masalah. Hal ini pun berlaku jika terjadi perkawinan secara Islam (perkawinan dilangsungkan di KUA), namun dalam perjalanan perkawinan tersebut salah seorang, baik suami atau istri menjadi murtad, maka kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 726 K/Sip/ 1976 tanggal 15 Februari 1977⁴⁶ menjadi wewenang Pengadilan Agama (berdasarkan penundukan hukum pertama kali melangsungkan perkawinan). Sehingga penerapan asas personal kelslaman didasarkan pada hubungan hukum yang melandasi terjadinya sengketa bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa terjadi.

Dalam hal putusan hakim yang menyatakan suatu perkawinan batal demi hukum di atur dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan perkawinan dapat dibatalkan di atur dalam Pasal 22, 24, 26 dan 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam. Batalnya suatu perkawinan yang terkandung dalam Pasal 28 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah setelah keputusan pengadilan mempunyai

⁴⁶ Data arsip PA Makassar, yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 726K/Sip/ 1976 yang berbunyi ”penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian) ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan,

kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat diberlangsungkannya perkawinan, begitu pula yang terkandung dalam Pasal 74 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dalam kasus murtadnya seseorang baik dari pihak suami ataupun istri yang perkawinannya telah berlangsung lama dan telah dikaruniai keturunan, maka putusan yang paling tepat adalah penjatuhan *talak satu ba'in shuugra* tergugat kepada penggugat (jika istri yang menggugat) atau penjatuhan *talak satu raj'i* terhadap termohon (jika suami yang mengajukan permohonan talak). Putusan ini lebih tepat karena berdampak pada adanya perlindungan terhadap anak yang dilahirkan (perwalian dan hak mewaris anak). Anak tetap mendapatkan hak mewaris dari ibu bapaknya akan tetapi lain halnya apabila putusan yang dijatuhkan adalah putusan pembatalan perkawinan (fasakh). Pembatalan berarti mengembalikan kepada kondisi semula yaitu kembali kepada keadaan dimana perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Dalam pasal 116 huruf (h) KHI, berpindahnya keyakinan salah seorang dari pasangan suami istri menjadi non muslim (murtad) merupakan penyebab putusnya atau berakhirnya suatu perkawinan. Adapun untuk memutuskan hubungan perkawinan itu maka hakim pengadilan dapat memutuskan perkawinan dengan cara memfasakh, mengabulkan permohonan talak dari pihak suami atau mengabulkan

gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Dikaitkan dengan perkara murtadnya seorang suami, maka hal tersebut haruslah dibuktikan di depan sidang pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Agama Makassar dalam hal ini memutuskan perkara perceraian antara pihak penggugat dan tergugat. Dalam hal pembuktian bahwa penggugat telah murtad, hal ini dibuktikan antara lain dengan :

1. Keterangan tergugat bahwa sejak bulan Desember 2011 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak seiman
 - b. Bahwa penggugat telah berpindah agama dari Islam ke Pantekosta
2. Keterangan saksi penggugat Erni Lewa binti Eiyang Wingkiong yang menyatakan bahwa sejak Desember 2011 penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tidur karena sering terjadi perselisihan yang diakibatkan penggugat kembali ke keyakinan semula yang dianut sebelum menikah yaitu pantekosta.

Dari pembuktian di atas, sudah sangat jelas murtadnya penggugat menimbulkan ketidakrukunan serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

Sehingga berdasarkan pasal 116 huruf (h) KHI dan dan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 serta pasal 19 huruf (f), pertimbangan Hakim PA Makassar pada perkara no.152/Pdt.G/2012/PA.Mks yang menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah *talak ba'in* tergugat terhadap penggugat dirasakan sudah tepat mengingat perbedaan agama sebagai hal yang paling prinsipil dalam kehidupan berumah tangga, sehingga murtad yg dilakukan istri tentunya dapat mempengaruhi ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Sehingga murtad dapat dijadikan dasar alasan yang kuat untuk memutuskan suatu perkawinan.

Mengenai dikabulkannya pemeliharaan anak ditangan penggugat rekonvensi (tergugat/suami) oleh Hakim dengan mendasarkan pada kekhawatiran Penggugat rekonvensi akan jaminan masa depan dan agama anak-anak jika berada dalam hak asuh tergugat rekonvensi (penggugat/istri). Dalam wawancara dengan ibu Dra. Hj. Nurjaya, M.H., beliau mengatakan bahwa memang berdasarkan pasal 105 huruf (a) KHI pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi pada pasal 156 huruf (c) disebutkan :

“apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi...”

Dalam hal ini pemegang hadhanah adalah ibu, ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak seperti yang dijelaskan dalam pasal diatas, dan oleh karena itu si ayah bermaksud untuk mengambil hak asuh anak maka pengadilan agama dapat memberikan

hak hadhanah kepada ayah, dengan syarat yang harus dibuktikan di depan persidangan. Dalam praktiknya, hakim berupaya agar hak pemeliharaan anak berada pada orang tua yang beragama Islam dengan dasar pertimbangan terjaminnya masa depan dan aqidah anak.

Hal ini tidak menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan oleh hakim jika hak perwalian anak tidak dimasukkan dalam isi petitum penggugat dan/atau tidak menjadi isi rekonvensi tergugat. Hal lain yakni jika orang tua yang beragama Islam bersedia melepas hak asuhnya terhadap anak-anaknya.

Pertimbangan hakim atas perkara no.152/Pdt.G/2012/PA.Mks sudah tepat. Karena walaupun tidak ada peraturan hukum formil dan materiil yang mengatur tentang pemeliharaan anak berada di tangan orang tua yang beragama Islam akan tetapi dalam hal salah satu orang tua *Murtad*, maka pemegang hadhanah sebaiknya adalah orang tua yang beragama Islam. Hal ini untuk menjamin masa depan keIslaman dan aqidah anak.

C. Akibat Hukum Putusan Hakim Pengadilan Makassar No. 152/Pdt.G/2012/PA. Mks

Suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan diakhiri dengan adanya suatu putusan hakim atau Pengadilan. Putusan mengikat kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi⁴⁷.

⁴⁷ Harahap, 1993:342

Dengan ditetapkannya putusan yang diucapkan oleh majelis hakim tidak hanya mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak karena ditetapkan hukumnya siapa yang benar siapa yang salah akan tetapi menimbulkan suatu keadaan atau status tertentu terhadap para pihak yang berperkara. Seperti pada perkara cerai gugat istri murtad dengan no.152/Pdt.G/2012/PA.Mks., selain mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat, hakim juga menetapkan hak pemeliharaan anak kepada suami (bapak).

Lebih lengkapnya isi putusan hakim untuk perkara cerai gugat istri murtad no.152/Pdt.G/2012/PA.Mks tertuang dalam amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak ba'in tergugat, **Fahrul Mustafa bin Baharuddin** terhadap penggugat, **Ailiwati binti Benny Johan**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkrkuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi;

- Menetapkan kedua anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi, bernama **Wilbert Aditya Fahli dan aprilya Angelyna Fahli**

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) .

Murtad sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Kemurtadan yang terjadi dalam biduk rumah tangga dapat menimbulkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa seseorang yang keluar dari agama Islam (murtad) mempunyai dampak terhadap status perkawinan, terhadap hak dan kewajiban pemeliharaan anak serta terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung

1. Terhadap Status Anak

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 dan UU no. 1 tahun 1974 pasal 42 dan 43, dijelaskan secara umum tentang kedudukan (status) anak. Peraturan-peraturan tersebut menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi, penentuan sah atau tidaknya seorang anak tergantung kepada sah atau tidaknya perkawinan itu sendiri beserta akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan itu nantinya.

Dalam hal ini diartikan, bahwa perkawinanlah yang akan menentukan status anak sah atau tidak. Jika perkawinan itu sah, baik menurut hukum Islam maupun hukum formil maka status anak tersebut adalah sah. Akan tetapi, apabila perkawinan dari kedua orang tuanya itu tidak sah maka status anak yang dilahirkannya menjadi anak tidak sah.

Pada putusan no.152/Pdt.G/2012/PA.Mks, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan *talak ba'in* tergugat, **Fahrul Mustafa bin Baharuddin** terhadap penggugat **Ailiwati binti Benny Johan**. Terkait dalam hal pembuktian sahnya perkawinan, penggugat melampirkan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 156/60/III/2004 tanggal 25 Maret 2004, yang membuktikan penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2004 dan pernikahan itu telah dicatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Makassar, kota Makassar. Dengan demikian terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.

Oleh karena anak-anak tersebut dianggap sebagai anak sah, maka status hukumnya adalah sebagai berikut :

- a. Anak tetap bernasab kepada ayah dan ibu
- b. Anak mewaris dari ayah dan ibu
- c. Bila anak itu perempuan, maka ayah berhak menjadi wali dalam pernikahannya.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai akibat putusnya karena perceraian ialah:

1. *Baik ibu/bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila*

mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan memberikan keputusannya.

2. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak mampu dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.*
3. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.*

2. Terhadap Harta Bersama

Selain berpengaruh terhadap status anak, akibat hukum perceraian karena murtad juga berpengaruh terhadap pembagian harta bersama. Setelah majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan *thalaq ba'in* tergugat, **Fahrul Mustafa bin Baharuddin** terhadap penggugat **Ailiwati binti Benny Johan** maka dalam hal harta kekayaan harus diadakan pembagian, terutama terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung (harta bersama)

Menurut M. idris Ramulyo (1995:28), ada beberapa macam harta yang lazim dikenal di Indonesia, antara lain⁴⁸ :

- a. *Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing, harta jenis ini adalah hak dan dikuasai oleh masing-masing pihak (suami atau isteri). Dan menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (2), semua itu tetap di bawah penguasaan masing-masing.*
- b. *Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai itu, mungkin berupa modal usaha, atau perabot rumah tangga ataupun rumah tempat tinggal mereka. Dan apabila terjadi perceraian maka harta ini kembali kepada orang tua (keluarga) yang memberikan semula.*

⁴⁸ M. idris Ramulyo. Hukum Perkawinan, Kewarisan, hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam (Jakarta : PT. Sinar Grafika, tahun 1995, cet1) hal.28

- c. *Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat.*
- d. *Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam ikatan perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka dan disebut harta pencaharian. Harta ini menjadi harta bersama menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama.*

Yang akan dibahas adalah harta jenis keempat yakni harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Pengaturan pembagian harta ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 35 yang berbunyi :

- 1. *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*
- 2. *harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*

Hal ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan tersebut putus. Dengan begitu harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah, sampai saat perkawinan tersebut putus, baik karena salah satu meninggal atau karena perceraian. Maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama⁴⁹.

Pembagian harta juga diatur dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974, yang berbunyi :

- 1. *Mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*

⁴⁹ M. yahya Harahap. Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama (PT. Pustaka kartini.1990.cet 1) hal 299

2. mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya

Hal ini mengandung arti bahwa hanya harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan saja yang menjadi milik bersama yang harus dibagi menurut hukumnya masing-masing, sedangkan harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau wasiat tetap menjadi milik masing-masing pihak dan dikuasai penuh oleh masing-masing mereka.

Dalam hal pembagian harta yang didasarkan atas perceraian, seperti yang tertuang dalam pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua bersama suami dan isteri”

Berdasarkan pasal 37 mengenai pembagian harta bersama ini didasarkan atas adanya perceraian bukan memandang adanya perbedaan keyakinan (agama) yang disebabkan salah seorang suami atau isteri berpindah agama (murtad) dalam suatu perkawinan. Jadi perbedaan agama bukanlah menjadi masalah dalam pembagian harta bersama sepanjang diantara suami dan isteri sudah resmi bercerai atas dasar keputusan hakim dalam persidangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal perkawinan yang dilaksanakan secara Islam namun di kemudian hari terjadi sengketa perkawinan (gugatan atau permohonan cerai), maka gugatan atau permohonan talak tersebut diajukan ke Pengadilan Agama. Hal ini tetap menjadi kewenangan absolute peradilan agama walaupun salah satu pihak pasangan sudah tidak beragama Islam lagi (*murtad*). Karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat terjadinya sengketa. penerapan asas personalitas kelslaman dalam Pengadilan Agama diatur dalam UU nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 Pasal 2 Penjelasan Umum alenia ketiga dan Pasal 49 tentang perluasan kewenangan perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama. Adapun ketentuan yang lebih mengikat tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk bertugas dan menyelesaikan perkara cerai murtad yaitu berdasarkan hasil Rakernas MARI tahun 2005 bagian C Bidang Badilag angka 3 huruf (a) yang menyatakan bahwa "*Pengadilan Agama berwenang*

mengadili seseorang (pihak) yang sudah Murtad, karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi". Hal ini menjadikan hukum yang berlaku sewaktu perkawinan dilaksanakan sebagai tolok ukur penentuan pengadilan yang berwenang (kewenangan absolut). Upaya tersebut adalah langkah strategi mengeliminir sengketa kewenangan antar pengadilan, sekaligus menjaga asas keseimbangan antar pengadilan yang sangat dibutuhkan dalam negara hukum Indonesia.

2. Alasan perceraian yang disebabkan karena pindah agama (murtad) banyak terjadi dimasyarakat. Pada akhirnya pasangan suami isteri tersebut lebih memilih untuk membawa kasus ini ke pengadilan dengan harapan status hukum terhadap perkawinan mereka menjadi jelas Meskipun secara hukum Islam perkawinan mereka telah fasakh (batal). Selama persidangan Majelis hakim telah berupaya agar para pihak berdamai, namun apabila tidak berhasil maka hakim akan meneruskan acara pada pemeriksaan perkara yang diakhiri dengan putusan hakim. Selama persidangan pun hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya atau *Legal Reasoning* berdasarkan pemeriksaan selama persidangan. Walaupun dalam praktiknya perbuatan murtad jarang dijadikan

alasan utama suatu perceraian namun murtad lebih sering dijadikan alasan dari alasan lainnya yaitu timbulnya perselisihan yang terus menerus dan sulit didamaikan. Dalam kasus murtadnya seseorang baik dari pihak suami ataupun istri yang perkawinannya telah berlangsung lama dan telah dikaruniai keturunan, maka putusan yang paling tepat adalah penjatuhan *talak satu ba'in shuugra* tergugat kepada penggugat (jika istri yang menggugat) atau penjatuhan *talak satu raj'i* terhadap termohon (jika suami yang mengajukan permohonan talak). Putusan ini lebih tepat karena berdampak pada adanya perlindungan terhadap anak yang dilahirkan (perwalian dan hak mewaris anak). Anak tetap mendapatkan hak mewaris dari ibu bapaknya akan tetapi lain halnya apabila putusan yang dijatuhkan adalah putusan pembatalan perkawinan (fasakh). Pembatalan berarti mengembalikan kepada kondisi semula yaitu kembali kepada keadaan dimana perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa seseorang yang keluar dari agama Islam (murtad) mempunyai dampak terhadap status perkawinan, terhadap hak dan kewajiban pemeliharaan anak serta terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung.

a. Terhadap Status Anak

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 dan UU no. 1 tahun 1974 pasal 42 dan 43, dijelaskan secara umum tentang kedudukan (status) anak. Peraturan-peraturan tersebut menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi, penentuan sah atau tidaknya seorang anak tergantung kepada sah atau tidaknya perkawinan itu sendiri beserta akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan itu nantinya. Dalam hal ini diartikan, bahwa perkawinanlah yang akan menentukan status anak sah atau tidak. Pada putusan no.152/Pdt.G/2012/PA.Mks, status anak dari **Fahrul Mustafa bin Baharuddin** dan **Ailiwati binti Benny Johan** adalah anak sah dengan pembuktian Kutipan Akta Nikah Nomor 156/60/III/2004 tanggal 25 Maret 2004. Oleh karena itu, maka status hukumnya adalah sebagai berikut :

- 1) Anak tetap bernasab kepada ayah dan ibu
- 2) Anak mewaris dari ayah dan ibu
- 3) Bila anak itu perempuan, maka ayah berhak menjadi wali dalam pernikahannya.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pun telah menjelaskan mengenai akibat putusnya karena perceraian terhadap anak

b. Terhadap Harta Bersama

Pengaturan pembagian harta ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 35, pasal ini menyatakan terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan tersebut putus, baik karena salah satu meninggal atau karena perceraian. Maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Pembagian harta juga diatur dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974, Hal ini mengandung arti bahwa hanya harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan saja yang menjadi milik bersama yang harus dibagi menurut hukumnya masing-masing, sedangkan harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau wasiat tetap menjadi milik masing-masing pihak dan dikuasai penuh oleh masing-masing mereka. Sehingga pembagian harta bersama ini didasarkan atas adanya perceraian bukan memandang adanya perbedaan keyakinan (agama) yang disebabkan salah seorang suami atau isteri berpindah agama (murtad) dalam suatu perkawinan. Jadi perbedaan agama bukanlah menjadi masalah dalam pembagian harta bersama sepanjang diantara suami dan isteri sudah resmi bercerai atas dasar keputusan hakim dalam persidangan

B. Saran

1. Kewenangan Peradilan Agama yang semakin luas harus diimbangi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengadilan, sarana dan prasarana yang memadai, serta ketentuan hukum yang aplikatif. Dengan demikian paradigma baru peradilan agama benar-benar dapat menjawab tuntutan dan problem hukum yang berkembang di masyarakat.
2. Meskipun telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (h) namun alangkah baiknya jika dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 juga mengatur secara rinci tentang perceraian yang disebabkan salah satu pasangan menjadi murtad. Karena dalam Undang-Undang ini hanya menggolongkan putusnya perkawinan karena 3 hal, yaitu karena perceraian, karena kematian dan karena putusan pengadilan. Hal ini mengakibatkan alasan perceraian karena murtad hanya dijadikan alasan di bawah alasan lainnya oleh pasangan suami istri. Sehingga alasan perceraian karena murtad dapat dijadikan alasan utama putusnya perkawinan.
3. Masalah agama dalam perkawinan membawa dampak yang besar bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga banyak pasangan, hendaknya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak membawa akibat buruk di masa yang akan datang terhadap perkawinan dan anak-anak yang ada dalam perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Amir, *Dja'far*. 1983. *Fiqh Bagian Nikah, Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam*. Surakarta: Sitti Syamsiyah.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azhar Basyir, M.A. 1990. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Hukum UII.
- Amos, Abraham HF. 2007. *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Bakry, Hasbullah. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Basri, cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos wacana Ilmu
- Data arsip PA Makassar, Yurisprudensi MA No. 38 tahun 1990 MA 38/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991 yang berisi tentang prinsip hakim dalam memutuskan perceraian tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, serta apa penyebabnya
- Data arsip PA Makassar, yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 726K/Sip/ 1976 yang berbunyi "penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian) ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Departemen Agama RI. 2006. *Pedoman Pelaksanaan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI. 1985. *Kompilasi Hukum Islam Tentang NTCR II*. Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama.

- Dokumen PA Makassar, Mahkamah Agung, *Jawaban Alas Pertanyaan yang Diajukan PTA se-Indonesia Dalam Rakernas MARI Tahun 2005*, Denpasar 18 std 22 September 2005.
- Dokumen PA Makassar, Mahkamah Agung, *Jawaban Alas Pertanyaan yang Diajukan PTA se-Indonesia Dalam Rakernas MARI Tahun 2005*, Denpasar 18 std 22 September 2005.
- Depag RI. 1993. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara
- Depag RI. 1992/1993. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: Arda Utama
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munahakat*. Jakarta: Kencana.2003
- Harahap, Yahya. 1975 .*Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9*. Mesan:CV.Zahir Trading
- Harahap, yahya. 1990. *Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. PT. Pustaka kartini
1989. *Lembaga Lajnah Penerjemah Al-Qur'an*, Semarang:Toha Putra
- Latif, H.M Djamil. 1985. *Aneka Hukum Perceraian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mertokusumo, sudikno. 1999. *HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA*.Yogyakarta: Liberty
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Munawir, Ahmad Warson. 1996. *Kamus Indonesia – Arab*, Jakarta: Pustaka Progresif
- Ramulyo, H.M. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UUP Tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rifa'I, H.M. dan Baghawi Mas'udi. 1986. *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*. Terjemahan dari Musthafa Dhiibu Bhigha. Semarang: Cahaya Indah.

Ramulyo, H.M Idris. 1985. Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Ind-Hill. Co, 1985

Salim, Agus. 1989. *Risalah Nikah*, terjemahan dari H.S.A. Al-Hamdani. Jakarta: Pustaka Amani

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Subekti, R dan R. tjitrosudibio. 2007. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: BW Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta

B. Perundang-undangan

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi yang mewajibkan hakim, mediator dan para pihak yang berperkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983. Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

www.badilag.go.id diakses tanggal 11 Juli 2013

<http://miftakhulhuda.com> diakses tanggal 28 Juni 2013

<http://hukumpedia.com> diakses tanggal 2 Agustus 2013